

## Editorial: A Reflective Take on The Government Decisions in Facing Global Uncertainty

## Editorial: Refleksi Keputusan Pemerintah dalam Menghadapi Ketidakpastian Global

Shadu Satwika Wijaya

Setelah terjadinya Pandemi COVID-19 terjadi turbulensi yang masif dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat dan perekonomian nasional di berbagai negara (Benach, 2021; Peci et al., 2021; Purnama et al., 2020; Romer, 2021; Wijaya et al., 2023). Keputusan pemerintah dalam memprediksi perkembangan di masa depan pasca pandemi mengubah kehidupan banyak orang (Leach et al., 2021; Nayak, 2022). Pandemi menunjukkan bahwa umat manusia dihadapkan pada masa depan yang tidak pasti, di mana antisipasi dan ketahanan terhadap guncangan besar harus menjadi inti permasalahan dari studi dan praktik pembangunan. Ketika pendekatan arus utama untuk pembangunan bersifat *top down*, kaku dan berorientasi pada tujuan ekonomi yang didefinisikan secara sempit, pembangunan pasca pandemi harus memiliki pengetahuan dan politik yang transformatif, egaliter dan inklusif secara radikal sebagai intinya (Baumgartner et al., 2018; Cairney, 2012; Leach et al., 2021). Untuk itu, pertimbangan kemungkinan transformasi pasca pandemi dan memikirkan kembali pembangunan secara lebih luas pasca pandemi perlu untuk dilakukan.

Implikasi pandemi dalam 3 aspek utama, yaitu (1) diskresi kebijakan, ketika pengambilan keputusan dalam situasi darurat yang penuh ketidakpastian; (2) bagaimana ekonomi berfungsi, ketika pandemi telah meruntuhkan model pertumbuhan ekonomi konvensional; (3) bentuk-bentuk politik baru, ketika terjadi hubungan solidaritas dan kepedulian timbal balik warga-negara dalam menghadapi pandemi (Leach et al., 2021). Hal ini menunjukkan terjadinya kondisi tertentu yang menyebabkan perubahan yang radikal dan tiba-tiba (*issue network disclosure*) (Elander & Gustavsson, 2019; Fischer & Miller, 2017; Hai, 2016; McConnell & 't Hart, 2019; Scally, 2012; Skok,

1995). Pasca pandemi, beberapa kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjamin pembangunan nasional tetap berlangsung. Kebijakan tersebut membawa perubahan drastis pada alokasi pada beberapa program prioritas yang semula dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur ekonomi, berubah menjadi pemulihan dan mitigasi ekonomi serta penanggulangan bencana. Artinya, kebijakan publik tidak selalu berada di bawah keseimbangan politik yang stabil dan tidak serta merta berubah secara bertahap. Sebaliknya, hal ini menunjukkan perubahan kebijakan publik yang radikal dan drastis dalam waktu singkat. Artinya terjadi kondisi dimana keseimbangan politik suatu kebijakan publik terhenti atau terganggu atau lebih dikenal dengan istilah “punctuated equilibrium” (Birkland, 2019; Cairney, 2019a; Givel, 2010; Jolicoeur, 2018; Weible et al., 2018).

Inti dari kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan oleh aktor publik untuk memecahkan masalah publik (Arara et al., 2012; Botterill & Fenna, 2019; Peters & Pierre, 2006). Kebijakan publik dalam arti luas dapat diartikan sebagai hubungan unit pemerintahan dan lingkungannya (Smith & Larimer, 2018). Kebijakan publik dapat pula dimaknai sebagai tindakan aktor publik untuk menangani masalah atau isu publik (Anderson, 2011). Oleh karena itu, kebijakan publik secara umum dipahami sebagai tindakan aktor publik untuk mengatasi masalah atau isu publik. Namun, fakta menunjukkan bahwa kebijakan publik seringkali ditolak oleh penerima kebijakan atau pemangku kepentingan. Hal ini karena kebijakan publik yang dikeluarkan dianggap bertentangan dengan isu dan tuntutan publik. Gerakan publik menunjukkan ekspresi ketidakpuasan publik terhadap suatu kebijakan publik. Dengan demikian, perubahan kebijakan publik akan selalu dibutuhkan untuk senantiasa menjawab dan menyelesaikan persoalan publik. Namun demikian, perubahan kebijakan juga dapat disebabkan oleh perubahan kondisi eksternal kebijakan yang secara tiba-tiba menuntut adanya perubahan kebijakan. Hal ini karena, seperti yang dikemukakan di atas bahwa kebijakan publik merupakan hubungan antara unit pemerintah dan lingkungannya.

Keputusan yang diterbitkan oleh aktor publik dalam perjalanannya tidak selalu mampu efektif mengatasi masalah ataupun mampu menjawab peluang dengan kontekstual. Hal ini tak lepas dari adanya Bounded Rationality (Bazerman & Moore, 2013; Rubinstein, 2020; Secchi, 2010; Simon, 1997; Velupillai, 2017), di mana dalam teori ini diyakini bahwa setiap manusia mempunyai rasionalitas yang terbatas, yaitu keterbatasan dalam menyerap informasi dan memahami permasalahan sosial ataupun menangkap peluang secara

kontekstual sehingga keputusan yang dibuat tidak sempurna. Dengan demikian, menjadi sesuatu keniscayaan terjadinya perubahan atas keputusan-keputusan yang dikarenakan faktor ketidaksempurnaan keputusan terdahulu, yang merupakan akibat dari keterbatasan kemampuan atau rasionalitas individu pembuatnya.

Penyempurnaan atau perubahan atas keputusan yang ditujukan untuk memperbaiki hal-hal yang dianggap kurang dan mempertahankan yang dianggap telah baik dikenal sebagai pendekatan inkremental dalam proses pengambilan keputusan. Konsep ini lebih menekankan perubahan “tambal sulam”, yang dalam hal ini tetap mempertahankan komitmen keberlanjutan dari suatu keputusan sebelumnya (Lindblom, 1959, 2018). Keputusan tidak selamanya berubah dalam kondisi yang inkremental, keputusan dapat pula berubah secara radikal, drastis dan dalam tempo yang cepat. Kondisi ini dikenal dengan konsep *Punctuated Equilibrium* (Baumgartner et al., 2017; Prindle, 2012). Berdasarkan pendekatan *punctuated equilibrium*, para ahli teori kebijakan publik juga melihat fenomena yang sama dalam proses kebijakan publik, yaitu suatu kondisi dimana suatu kebijakan publik dapat berubah secara drastis atau radikal dalam waktu yang relatif singkat. Proses perubahan suatu kebijakan publik, dalam sudut pandang ahli teori klasik, berlangsung secara bertahap dan dalam jangka waktu yang panjang. Perubahan tersebut bersifat inkremental, mengikuti kebutuhan sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu. Namun, ahli teori modern tidak melihatnya dengan cara yang sama. Ahli teori modern seperti Baumgartner dan Jones (2018) berpandangan bahwa proses kebijakan publik berubah secara radikal dalam waktu yang relatif singkat. Baumgartner dan Jones (2018) mengemukakan bahwa keseimbangan politik suatu kebijakan (*policy monopoly*) tidak dapat stabil dalam waktu yang lama. Hal ini dikarenakan terkadang perubahan terjadi secara radikal dan tiba-tiba (*disclosure of issue network*). Oleh karena itu, kebutuhan akan kebijakan baru lahir. Perubahan yang radikal dan tiba-tiba, yaitu kondisi terungkapnya jaringan isu dalam kebijakan publik, terjadi sebagai akibat terganggunya perimbangan kekuatan politik antar pemangku kepentingan yang relatif stabil dalam waktu yang lama. Keseimbangan keseimbangan ini diselingi oleh pergeseran yang tiba-tiba akibat perubahan keadaan tertentu (Amri & Drummond, 2021; Baumgartner et al., 2017; Jolicoeur, 2018; Prindle, 2012; Weible et al., 2018). Perubahan drastis dan tiba-tiba juga bisa terjadi karena perubahan pengetahuan publik tentang isu kebijakan dan perimbangan kekuatan antara kelompok-kelompok yang berusaha melawan kepentingan yang sudah mengakar (Jolicoeur, 2018). Berdasarkan pendekatan

*punctuated equilibrium*, para ahli teori kebijakan publik juga melihat bahwa suatu kondisi di mana suatu kebijakan publik tidak dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama atau biasa disebut dengan monopoli kebijakan adalah tidak ada (Cairney, 2019b). Stabilitas kebijakan jangka panjang diikuti oleh perubahan yang cepat. Ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan tidak bertahap, kebijakan publik tidak akan berada di bawah ketidakstabilan yang konstan. Monopoli kebijakan terjadi berdasarkan koalisi antara pemerintah dan kelompok kepentingan. Mereka kemudian membentuk subsistem kebijakan dalam kerangka jaringan kebijakan. Monopoli kebijakan ini dikendalikan oleh sejumlah aktor yang relatif sedikit atau elitis.

Pasca pandemi peluang dan prospek pembangunan nasional dan pengembangan potensi lokal menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan *stakeholders*. Oleh sebab itu, pasca pandemi dapat dijumpai keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah bersama dengan *stakeholders* yang ditujukan untuk mengatasi masalah publik dalam konteks menghadapi ketidakpastian global. Keterlibatan *stakeholders* dibutuhkan untuk memperkuat sistem kelembagaan yang membentuk suatu jejaring kebijakan di masyarakat atau *policy network* (Grippa et al., 2018; Klijn & Koppenjan, 2015). Dalam suatu pengambilan keputusan, proses kolaboratif di antara *stakeholders* memegang peranan penting. Oleh karena itu, paradigma *collaborative governance* amat relevan dalam era yang penuh ketidakpastian. Proses kolaborasi menjembatani sektor pemerintah, komponen masyarakat dan swasta, di mana ragam kepentingan dipecahkan melalui dialog yang otentik (Innes & Booher, 2018). Enroth (2014) mengemukakan bahwa *governance* lebih menekankan pada upaya pemecahan masalah publik, bukan hanya sekadar membuat kebijakan untuk masyarakat. *Governance* bukan hanya dipahami sebagai seni membuat kebijakan untuk mengatur masyarakat, namun mengandung maksud yang lebih luas yaitu pelibatan masyarakat secara lebih luas agar persoalan yang melekat pada masyarakat itu sendiri dapat dipecahkan.

Keputusan dibuat oleh pemimpin organisasi yang berimplikasi eksternal bagi pihak terkait (Hansson, 2018; Society, 2014). Keputusan dihasilkan dalam konteks ekologi administrasi yang sangat kompleks di tengah Era Ketidakpastian. Untuk itu, paradigma pengambilan keputusan yang digunakan dapat melibatkan *stakeholders*. Sangat mungkin untuk membawa banyak pihak dalam penyelenggaraan urusan publik, proses kolaboratif berupaya menggabungkan spektrum sosial yang luas dan secara eksplisit melibatkannya dalam pengambilan keputusan strategis (Albejaidi et al., 2020; Birskyte, 2013;

Cunningham, 1972; Macintosh & Smith, 2007; Stansbury & Irvin, 2004; Zhong, 2011). Proses kolaboratif merupakan suatu proses dan struktur dalam pembuatan keputusan yang melibatkan masyarakat secara konstruktif untuk melaksanakan kepentingan publik yang tidak bisa dicapai tanpa melibatkan pihak swasta dan masyarakat (Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012; Emerson, Nabatchi, Balogh, et al., 2012; Wirtz & Müller, 2022). Partisipasi publik adalah faktor penting dalam kebijakan pembangunan, oleh karenanya harus dipastikan disesuaikan dengan konteks di mana mereka berada (Bobbio, 2019; Bryson et al., 2013). Upaya partisipatif dimungkinkan terjadi dengan media forum kolaboratif. Untuk menghadirkannya terdapat beberapa kunci, antara lain: sistem yang dinamis, adaptif dan kompleks (Johnston, 2010). Kerangka kerja jejaring kolaboratif ini dapat terlihat dalam bentuk koordinasi antar lembaga baik secara vertikal, maupun secara horizontal dan diagonal dengan masyarakat sipil (Coaffee & Deas, 2008; de Leon & Varda, 2009; Grippa et al., 2018).

Dinamika pembangunan secara spesifik dibahas pada artikel ketujuh dalam edisi kali ini. Artikel tersebut ditulis oleh Muhammad Husnul Maab, peneliti dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cilacap. Dalam artikel tersebut diperoleh hasil penelitian berupa strategi pembangunan dan pengembangan wilayah di area sekitar Jaringan Jalan Lintas Selatan Trase Batas Jawa Barat–Patimuan–Bantarsari berbasis ekonomi lokal melalui kegiatan agrikultur, perikanan, dan Usaha Kecil Mikro Menengah.

Dalam edisi 6.1. ini terdapat 7 artikel yang membahas teman-teman sosial politik. Tulisan pertama dari Muhammad Jullyo Bagus Firdaus, Mahasiswa Pasca Sarjana Belgrade University Serbia berjudul *Rethinking Serbia Foreign Policy: Case of Open Balkan Initiative and EU Accession*. Artikel tersebut membahas mengenai kebijakan luar negeri Serbia kaitannya dengan *Open Balkan Initiative* dan *EU Accesion*. Dalam tulisan ini penulis berargumen bahwa Serbia sedang berada dalam fase *balancing West* dan *East* untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Selanjutnya, artikel kedua dari Lidia Tri Chris Nia Wati, Mahmud Syaltout Syahidullhaq dan Bimantoro Kushari Pramono dari Universitas Paramadina berjudul *Comparative Analysis of Cyber Sovereignty: Case from Indonesia and Iran Cyber Activities Pattern: Indonesia and Iran*. Dalam artikel ini penulis membahas mengenai kedaulatan digital antara Indonesia dan Iran.

Artikel ketiga ditulis oleh Arum Tri Utami dari Universitas Jenderal Soedirman dengan judul *The Implementation of the Scandinavian Model of Welfare*

*State in the Swedish Economic Development*. Dalam artikel ini penulis mendiskusikan mengenai sistem *welfare state* khas negara Skandinavia menjadi salah satu elemen penting dalam progres ekonomi dari Swedia.

Artikel keempat ditulis oleh Dias Pabyantara Swandita Mahayasa dari Universitas Jenderal Soedirman dengan judul *Nudity as Strategy: Examining Femen Sextremism Ideology to Weaponize Women's Body*. Dalam artikel ini penulis mendiskusikan mengenai gerakan perempuan yang mendeskonstruksi nilai sosial dari tubuh perempuan dan mengubah makna tubuh perempuan dari obyek seksual menjadi senjata untuk melakukan protes.

Artikel kelima ditulis oleh Alung Amelia Puspita Sari, Joko Mulyono, Nurina Adi Paramitha dari Universitas Jember dengan judul *Strategi Pemenuhan Kebutuhan Hidup Usaha Migran Sirkuler Buruh Tani Sayur Wonokupang, Sidoarjo*. Dalam artikel ini penulis mendiskusikan mengenai strategi pemenuhan kebutuhan hidup usaha migran sirkuler buruh tani sayur yaitu ekonomi dan pola kehidupan, pola kerja di tempat migran dan pembangunan jaringan sosial. Selain itu terdapat perubahan sosial ekonomi yang dirasakan para buruh tani sayur migran sirkuler.

Artikel keenam ditulis oleh Indah Ayu Permana Pribadi, Dian Nastiti dari Universitas Nahdatul Ulama Purwokerti dengan judul *Kolaborasi Stakeholders dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Desa Wisata di Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng*. Dalam tulisan ini penulis mendiskusikan mengenai kolaborasi antar stakeholders dalam pemberdayaan masyarakat berbasis desa wisata di Desa Melung kecamatan Kedungbanteng sudah berjalan dengan baik walau ada beberapa kendala seperti; kurangnya partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, stakeholders yang terkait tetap melakukan upaya untuk peningkatan partisipasi masyarakat dengan mengadakan berbagai pelatihan untuk menunjang berkembangnya Desa Wisata Melung.

Ketujuh artikel ini menjadi langkah awal kami di JUSS (Jurnal Sosial Soedirman) untuk memulai langkah dan komitmen baru dalam penerbitan ide-ide ilmiah. Kedepan kami berharap JUSS dapat menjadi tempat sirkulasi gagasan untuk berkontribusi terhadap kemajuan kajian sosial politik di Indonesia dan dunia.

**Hormat kami,**

**Shadu Satwika Wijaya**

**Editor**

## Daftar Pustaka

- Albejaidi, F., Mughal, Y. H., & Kundi, G. M. (2020). Decision making, leadership styles and leadership effectiveness: An amos-sem approach. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 9(1).
- Amri, M. M., & Drummond, D. (2021). Punctuating the equilibrium: an application of policy theory to COVID-19. *Policy Design and Practice*, 4(1). <https://doi.org/10.1080/25741292.2020.1841397>
- Anderson, J. E. (2011). Public Policymaking, 7th edition. In *Media*.
- Arara, E., Fritzen, S., Howlett, M., Ramesh, M., & Wu, X. (2012). *Routledge Handbook of Public Policy* (1st Editio). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203097571>
- Baumgartner, F. R., Carammia, M., Epp, D. A., Noble, B., Rey, B., & Yildirim, T. M. (2017). Budgetary change in authoritarian and democratic regimes. *Journal of European Public Policy*, 24(6). <https://doi.org/10.1080/13501763.2017.1296482>
- Baumgartner, F. R., Jones, B. D., & Mortensen, P. B. (2018). Punctuated Equilibrium Theory: Explaining Stability and Change in Public Policymaking. In *Theories of the Policy Process* (pp. 55–101). <https://doi.org/10.4324/9780429494284-3>
- Bazerman, M. H., & Moore, D. H. (2013). Introduction to Managerial Decision Making. *Judgment in Managerial Decision Making*, 1–10.
- Benach, J. (2021). We Must Take Advantage of This Pandemic to Make a Radical Social Change: The Coronavirus as a Global Health, Inequality, and Eco-Social Problem. *International Journal of Health Services*, 51(1). <https://doi.org/10.1177/0020731420946594>
- Birkland, T. A. (2019). An introduction to the policy process: Theories, concepts and models of public policy making. In *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts and Models of Public Policy Making*. <https://doi.org/10.4324/9781315292335>
- Birskyte, L. (2013). Involving citizens in public decision making: the case of participatory budgeting in Lithuania. *Financial Theory and Practice*, 37(4). <https://doi.org/10.3326/fintp.37.4.3>
- Bobbio, L. (2019). Designing effective public participation. *Policy and Society*, 38(1). <https://doi.org/10.1080/14494035.2018.1511193>
- Botterill, L. C., & Fenna, A. (2019). *Interrogating Public Policy Theory*. Edward Elgar. <https://doi.org/10.4337/9781784710088.00007>
- Bryson, J. M., Quick, K. S., Slotterback, C. S., & Crosby, B. C. (2013). Designing Public Participation Processes. *Public Administration Review*, 73(1). <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2012.02678.x>
- Cairney, P. (2012). Punctuated Equilibrium. In *Understanding Public Policy: Theories and Issues* (Vol. 55). Palgrave Macmillan.
- Cairney, P. (2019a). *Understanding Public Policy*. Bloomsbury Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-0-230-35699-3>
- Cairney, P. (2019b). Understanding Public Policy. In *Understanding Public Policy*.

- Bloomsbury Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-0-230-35699-3\\_10](https://doi.org/10.1007/978-0-230-35699-3_10)
- Coaffee, J., & Deas, I. (2008). The search for policy innovation in urban governance: Lessons from community-led regeneration partnerships. *Public Policy and Administration*, 23(2). <https://doi.org/10.1177/095207670707086254>
- Cunningham, J. V. (1972). Citizen Participation in Public Affairs. *Public Administration Review*, 32. <https://doi.org/10.2307/975227>
- de Leon, P., & Varda, D. M. (2009). Toward a theory of collaborative policy networks: Identifying structural tendencies. *Policy Studies Journal*, 37(1), 59–74. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2008.00295.x>
- Elander, I., & Gustavsson, E. (2019). From policy community to issue networks: Implementing social sustainability in a Swedish urban development programme. *Environment and Planning C: Politics and Space*, 37(6). <https://doi.org/10.1177/2399654418820077>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1). <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Emerson, K., Nabatchi, T., Balogh, S., Kirk Emerson, G., Nabatchi, T. P., & Balogh, S. (2012). Public Management Research Association An Integrative Framework for Collaborative Governance An Integrative F. *Source Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART*, 22(1).
- Enroth, H. (2014). Governance: The art of governing after governmentality. *European Journal of Social Theory*, 17(1). <https://doi.org/10.1177/1368431013491818>
- Fischer, F., & Miller, G. J. (2017). Handbook of public policy analysis: Theory, politics, and methods. In *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods*. <https://doi.org/10.4324/9781315093192>
- Givel, M. (2010). The evolution of the theoretical foundations of punctuated equilibrium theory in public policy. In *Review of Policy Research* (Vol. 27, Issue 2). <https://doi.org/10.1111/j.1541-1338.2009.00437.x>
- Grippa, F., Leitãocesca, J., Gluesing, J., Riopelle, K., & Gloor, P. (2018). Collaborative Innovation Networks: Building Adaptive and Resilient Organizations. In *Web Science and the Mind*.
- Hai, D. . (2016). Process of Public Policy Formulation in Developing Countries. *Public Policy, C*.
- Hansson, S. O. (2018). Decision theory. *Decision Theory*, 1–185. <https://doi.org/10.4324/9780203793695>
- Innes, J. E., & Booher, D. E. (2018). Planning with complexity: An introduction to collaborative rationality for public policy. In *Planning with Complexity: An Introduction to Collaborative Rationality for Public Policy*. <https://doi.org/10.4324/9781315147949>
- Johnston, E. (2010). Governance infrastructures in 2020. *Public Administration Review*, 70(SUPPL. 1). <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2009.02116.x>
- Jolicoeur, M. M. (2018). An Introduction to Punctuated Equilibrium: A Model for Understanding Stability and Dramatic Change in Public Policies. *National*



- Collaborating Centre for Healthy Public Policy, January.*
- Klijn, E. H., & Koppenjan, J. (2015). Governance networks in the public sector. In *Governance Networks in the Public Sector*. <https://doi.org/10.4324/9781315887098>
- Leach, M., MacGregor, H., Scoones, I., & Wilkinson, A. (2021). Post-pandemic transformations: How and why COVID-19 requires us to rethink development. *World Development*, 138. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105233>
- Lindblom, C. E. (1959). Science of Muddling Through. *Public Administration Review*, 19.
- Lindblom, C. E. (2018). The science of “muddling through.” In *Performance Based Budgeting* (pp. 39–55). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9780429498411>
- Macintosh, A., & Smith, E. (2007). Citizen Participation in Public Affairs. In *Electronic Government*. [https://doi.org/10.1007/3-540-46138-8\\_41](https://doi.org/10.1007/3-540-46138-8_41)
- McConnell, A., & 't Hart, P. (2019). Inaction and public policy: understanding why policymakers ‘do nothing.’ *Policy Sciences*, 52(4). <https://doi.org/10.1007/s11077-019-09362-2>
- Nayak, B. S. (2022). Post-pandemic Transformations: How and Why COVID-19 Requires International Business to Rethink Its Praxis. In *Political Economy of Development and Business*. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-11093-1\\_13](https://doi.org/10.1007/978-3-031-11093-1_13)
- Peci, A., Avellaneda, C. N., & Suzuki, K. (2021). Governmental responses to covid-19 pandemic. *Revista de Administracao Publica*, 55(1). <https://doi.org/10.1590/0034-761220210023>
- Peters, B. G., & Pierre, J. (2006). Handbook of Public Policy. In *Handbook of Public Policy*. SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781848608054>
- Prindle, D. F. (2012). Importing concepts from biology into political science: The case of punctuated equilibrium. *Policy Studies Journal*, 40(1). <https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2011.00432.x>
- Purnama, D. T., Juliansyah, V., & Chainar. (2020). Covid-19 Pandemic , Social Changes and Its Consequences in Society. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 25(1).
- Romer, C. D. (2021). The Fiscal Policy Response to the Pandemic. In *Brookings Papers on Economic Activity: Vol. Spring 2021* (Issue spring). <https://doi.org/10.1353/eca.2021.0009>
- Rubinstein, A. (2020). Modeling Bounded Rationality in Games. In *Modeling Bounded Rationality*. The MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/4702.003.0010>
- Scally, C. P. (2012). Community development corporations, policy networks, and the rescaling of community development advocacy. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 30(4), 712–729. <https://doi.org/10.1068/c11116>
- Secchi, D. (2010). Extendable Rationality: Understanding Decision Making in Organizations. In *Media*.

- Simon, H. A. (1997). Models of Bounded Rationality. In *Models of Bounded Rationality*. The MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/4711.001.0001>
- Skok, J. E. (1995). Policy Issue Networks and the Public Policy Cycle: A Structural-Functional Framework for Public Administration. *Public Administration Review*, 55(4). <https://doi.org/10.2307/977123>
- Smith, K. B., & Larimer, C. W. (2018). *The Public Policy Theory Primer* (3rd Editio). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429494352>
- Society, A. (2014). A "Third" Approach To Decision-Making. 27(5), 385–392.
- Stansbury, J., & Irvin, R. A. (2004). Citizen Participation in Decision Making: Is It Worth The Effort? *Public Administration Review*, 64(1), 55–65. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1540-6210.2004.00346.x>
- Velupillai, K. V. (2017). Models of Simon. In *Models of Simon*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203462447>
- Weible, C. M., Sabatier, P. A., Baumgartner, F. R., Jones, B. D., & Mortensen, P. B. (2018). Punctuated Equilibrium Theory: Explaining Stability and Change in Public Policymaking. In *Theories of the Policy Process* (pp. 55–101). <https://doi.org/10.4324/9780429494284-3>
- Wijaya, S. S., Rosyadi, S., S., Gunarto, G., & . A. (2023). Challenges to Local Public Service in the Post Pandemic. *International Conference on Politics, Social, and Humanities Sciences (2nd ICPSH 2022)*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i3.12811>
- Wirtz, B. W., & Müller, W. M. (2022). An Integrative Collaborative Ecosystem for Smart Cities — A Framework for Organizational Governance. *International Journal of Public Administration*. <https://doi.org/10.1080/01900692.2021.2001014>
- Zhong, C. B. (2011). The ethical dangers of deliberative decision making. *Administrative Science Quarterly*, 56(1), 1–25. <https://doi.org/10.2189/asqu.2011.56.1.001>